

Yth Bapak Joseph Saunders
Wakil Direktur Program
Human Rights Watch
Di tempat

Jakarta, 22 Agustus 2019

Dengan hormat,

Melalui surat ini kami sampaikan beberapa tanggapan kami terhadap surat yang Bapak kirimkan pada tanggal 26 Juni 2019 lalu kepada PT Sari Aditya Loka-1. Dalam surat Bapak, dikatakan bahwa "HRW melakukan penelitian tentang dampak transaksi tanah secara komersial berskala besar pada masyarakat, termasuk masyarakat adat di Kalimantan dan di Jambi".

Tanggapan:

Apakah HRW telah mendapatkan izin dari Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan riset ini. Jika iya, apakah Kami bisa mendapatkan copy dari surat izin tersebut?.

Dalam surat Bapak juga disebutkan, bahwa di Sarolangun, penelitian Anda berfokus kepada hak atas tanah, dan meneliti bagaimana akses orang rimba terhadap tanah, air, peluang mata pencaharian, ketahanan pangan dan hak atas budaya terkena imbas dari pendirian dan operasi perkebunan kelapa sawit PT Sari Aditya Loka 1.

Tanggapan:

Apakah dalam penelitian ini, HRW juga menginformasikan, berkomunikasi dan melibatkan pihak Pemerintah Daerah Sarolangun?. Mengapa penelitian HRW hanya terfokus kepada PT SAL?, karena keberadaan PT SAL di wilayah ini adalah membantu program Pemerintah untuk mengembangkan perkebunan sawit inti rakyat (PIR-TRANS) yang dimulai tahun 1987 dengan wilayah kebun sawit rakyat yang jauh lebih luas dari PT SAL itu sendiri.

Adapun tanggapan terhadap hasil penelitian dan pertanyaan terdapat pada tabel berikut.

Salam

Bandung Sahari

TANGGAPAN TERHADAP HASIL TEMUAN

NO	HASIL TEMUAN	TANGGAPAN/KLARIFIKASI	DATA PENDUKUNG / DOKUMENTASI
1. INFORMASI DARI WARSI			
a	<p>- Menurut Komunitas Konservasi Indonesia (WARSI), sebuah LSM lokal, sekitar 750 Orang Rimba masih tinggal di dalam area perkebunan PT Sari Aditya Loka 1.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bisakah dikirimkan datanya mengenai 750 warga Orang Rimba yang dimaksud siapa saja dan berasal dari kelompok mana?. 2. Pada tahun 2017, PT SAL-1 bersama Warsi dan Daemeter telah melakukan survey untuk verifikasi bersama data demografi keluarga Orang Rimba yang berada di sekitar PT SAL. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa terdapat 217 Kepala Keluarga dan 898 jiwa. Dari data tersebut, terdapat sekitar 124 KK dan 478 jiwa yang tinggal di luar kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas. Dari 478 jiwa : <ul style="list-style-type: none"> • 38 KK dan 109 jiwa adalah Rombongan Sikar yang tinggal di Kab. Merangin dan sebagian telah mempunyai rumah yang disediakan oleh PT SAL-1 • 26 KK dan 99 jiwa yang terdiri dari Sub Rombongan Mete dan H. Helmi semuanya telah memiliki rumah dan semuanya menetap • 24 KK dan 102 jiwa dari Sub Rombongan Tarib sebagian besar telah memiliki rumah • Sementara itu sisanya 36 KK dan 168 jiwa dari Sub Rombongan Betaring dan Ngelam sebagian memiliki rumah dan masih menetap dan atau nomaden 	
b	<p>Orang Rimba dan Komunitas Konservasi Indonesia (WARSI) mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa mereka telah bertemu dengan perwakilan perusahaan PT SAL untuk mengembangkan rencana untuk memberikan ganti rugi atas hilangnya tanah dan menumbuhkan sumber mata pencaharian alternatif yang layak.</p> <p>Mereka mengatakan pertemuan mereka dengan SAL belum berhasil.</p>	<p>Keberadaan PT SAL di wilayah Sarolangun karena permintaan Pemerintah untuk membantu program Perkebunan Inti Rakyat-Trans, yang dimulai tahun 1987.</p> <p>Berdasarkan Pasal 28 ayat 1 Undang – Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu tertentu, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.</p> <p>Lahan yang diusahakan oleh PT SAL-1 adalah dalam bentuk HGU. Oleh karena itu kewenangan terhadap lahan HGU tersebut ada di tangan Negara.</p> <p>Dalam kaitan dengan “menumbuhkan sumber mata pencaharian alternatif”, Kami selama bertahun-tahun berupaya mengembangkan sumber-sumber ekonomi penting untuk komunitas Orang Rimba yang bersinggungan dengan PT SAL.</p>	

		<p>Sejak tahun 2008, kegiatan telah banyak dilakukan mulai dari pelatihan montir, pendampingan kebun sayur, budidaya ikan, beternak ayam, penggemukan labi-labi, budidaya jahe dan bertanam jernang.</p> <p>Semua program yang dibangun didasarkan atas permintaan dan kebutuhan Orang Rimbo. Kami juga selalu berupaya untuk terus melakukan perbaikan dalam rangka analisa kebutuhan Orang Rimba dan bagaimana kebutuhan tersebut dapat dipenuhi.</p>	
c	<p>Orang Rimba mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa perusahaan belum mengambil langkah apa-apa untuk mengeksplorasi restitusi atau kompensasi yang adil dan layak atas kerugian yang terus mereka derita.</p>	<p>Dapatkan kami mendapat informasi tentang Orang Rimba yang menjadi korespondensi HRW?. Karena dalam hal ini komunitas orang rimbo sangatlah luas.</p> <p>Untuk membantu kehidupan yang lebih layak untuk Orang Rimba kami melakukan Analisa kebutuhan (need assessment) dan mengklasifikasikannya ke dalam tiga pilar: (1) pilar Pendidikan, (2) pilar kesehatan (3) Peningkatan ekonomi.</p> <p>Pilar Pendidikan</p> <p>PT SAL melihat bahwa pendidikan merupakan faktor utama untuk menghasilkan generasi masa depan yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Di saat yang sama, Orang Rimba juga memiliki akses yang terbatas terhadap pendidikan formal. Kebiasaan hidup berpindah (melangun) juga merupakan salah satu faktor budaya yang menjadi kendala pendidikan anak-anak Orang Rimba.</p> <p>Melihat hal ini, PT SAL berupaya menyediakan akses Pendidikan untuk komunitas Orang Rimba telah dengan mengelola sembilan sekolah baik yang dikelola sendiri maupun bekerja sama dengan instansi pemerintah di pemukiman Orang Rimba</p> <p>Program pendidikan yang telah digulirkan meliputi program pendirian 11 unit sanggar belajar baik yang dikelola sendiri maupun bekerja sama dengan pemerintah. Total siswa pada 11 sanggar belajar tersebut total berjumlah 255 siswa. Sanggar belajar tersebut antara lain.</p> <p>a. Sekolah Halom Putri Tijah Sekolah Halom Putri Tijah didirikan oleh PT Sari Aditya Loka pada tanggal 9 Juni 2009 dan dikembangkan di kelompok Suku Anak Dalam Temenggung Tarib Desa Pematang Kabau, Kec. Air Hitam, Kab. Sarolangun. Program ini dirintis oleh PT SAL 1 diberikan nama Sekolah Halom Putri Tijah. Sekolah ini difungsikan untuk memberikan pendidikan baca, tulis dan</p>	

		<p>hitung kepada Suku Anak Dalam. Keberadaan sekolah di tengah komunitas Suku Anak Dalam ini selain untuk pemberantasan buta huruf yang terus didengungkan pemerintah, juga bertujuan untuk mendekatkan pentingnya pendidikan kepada keluarga dan anak-anak usia sekolah di komunitas Suku Anak Dalam.</p> <p>Pada awal didirikannya Sekolah Halom Putri Tijah tercatat 18 anak yang mengikuti kegiatan belajar mengajar yang seluruhnya berasal dari Temenggung Tarib. Seiring dengan pola hidup tradisional suku anak dalam dan dinamika kelompok dan keluarga, jumlah anak yang mengikuti pendidikan ini mengalami pasang surut.</p> <p>Faktor penyebabnya adalah terjadinya perpindahan tempat tinggal jauh ke dalam hutan karena aktivitas berkebun dan berburu serta ritual Melangun pindah tempat tinggal dikarenakan adanya kasus kematian anggota kelompok.</p> <p>Sistem pembelajaran di sekolah ini terbagi menjadi tingkat PAUD/TK sampai dengan tingkat Kesetaraan (Paket A, B dan C). Pada prosesnya peserta didik akan dilatih sesuai dengan tingkat pendidikannya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan lingkungan para siswa.</p> <p>Setiap pagi sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, para siswa datang sendiri ke sekolah. Mereka diajarkan tentang mandi dan berpakaian oleh para guru.</p> <p>b. PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Nurul Ikhlas Program ini dimulai pada tahun 2011. Perencanaan program bersama para stakeholder dilakukan agar pembinaan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Kegiatan perencanaan dalam bentuk diskusi ini dilaksanakan di rumah Temenggung Tarib dan dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat setempat, termasuk tokoh-tokoh Suku Anak Dalam sendiri yang menjadi sasaran program ini.</p> <p>Selain membahas mengenai lokasi, pertemuan tersebut juga membahas mengenai guru yang akan mengajar di sekolah tersebut. Ibu Susilawati adalah guru yang berasal dari</p>	
--	--	--	--

		<p>Komunitas Orang Rimba. Dengan adanya guru dari SAD sendiri akan mempermudah dalam proses pendidikan, karena Ibu Susilawati memiliki bahasa dan budaya yang sama.</p> <p>Sebelum adanya program ini, gedung PAUD yang ada di wilayah Air Panas kondisinya sudah rusak dan luas gedungnya pun tidak memadai karena jumlah anak-anak yang cukup banyak. Sesuai dengan kesepakatan pada musyawarah bersama tokoh masyarakat, dibangunlah sebuah gedung sekolah yang baru untuk anak-anak Suku Anak Dalam tersebut. Gedung yang dibangun dilengkapi dengan kamar mandi, gudang, sumur dan lahan bermain yang cukup luas.</p> <p>c. Sekolah Rajo Nasar Sekolah ini bersamaan dengan pembangunan rumah untuk Rombongan Sikar. Program dimulai saat Rombongan Tumenggung Sikar mulai menempati lokasi perumahan yang terletak di Desa Mentawak Kecamatan Nalo Tantan pada tahun 2013.</p> <p>Mereka bekerja sama dengan PT Sari Aditya Loka 1 melalui program CSR membantu mendirikan Balai pertemuan sekaligus berfungsi sebagai balai pendidikan. Sekolah ini diberi nama Rajo Nasar dan didirikan pada tahun 2013. Kegiatan pembelajaran yang diajarkan yaitu Baca, Tulis, Hitung, PHBS dan perilaku.</p> <p>d. Sekolah Rimbo Pintar Sungai Kuning Sekolah Rimbo Pintar terletak di Sungai Kuning yang berada di wilayah Taman Nasional Bukit Dua Belas dan berdiri sejak bulan September tahun 2016. Sekolah ini digagas sebagai sekolah bersama, di mana idenya tercetus dari Balai Kehutanan Kabupaten Sarolangun untuk memfasilitasi anak-anak agar bisa belajar. Diskusi antara petugas Resort Air Hitam I dengan Kepala Seksi SPTN Wilayah II berkenaan dengan kebutuhan adanya pendidikan bagi anak-anak Suku Anak Dalam khususnya kelompok Temenggung Bepayung.</p> <p>Pembangunan Sekolah Rimba dimulai tanggal 14 Mei 2016, dilakukan secara bergotong royong oleh team PT SAL dan Suku Anak Dalam Kelompok Tumenggung Bepayung.</p>	
--	--	--	--

		<p>Pembangunan Sekolah Rimba diselesaikan pada tanggal 19 Juli 2016, yang dikerjakan selama 12 hari kerja. Sekolah mulai beroperasi pada bulan Juli 2016. Semua pihak ikut berkontribusi terhadap pembangunan sekolah mulai dari Masyarakat SAD (Kelompok Tumenggung Bepayung), PT SAL-1, Masyarakat Mitra Polhut Resort Air Hitam I, Masyarakat Peduli Api Resort Air Hitam I, Masyarakat Mitra Polhut Resort Air Hitam II. Sanggar belajar ini terdiri dari 3 kelompok yaitu Kelas Awal, Kelas Dasar dan TK. Kelas awal diperuntukkan untuk siswa usia 7-9 tahun, Kelas dasar diperuntukkan untuk siswa usia 10-12 tahun dan TK untuk siswa usia 4-6 tahun.</p> <p>e. PAUD Nurul Islam PAUD Nurul Islam terletak di Jalan Singosari Desa Pematang Kabau di wilayah pemukiman Suku Anak Dalam kelompok Temenggung Afrizal. Awal berdirinya PAUD Nurul Islam pada Januari 2013 menempati gedung Madrasah yang dibangun oleh pemerintah Kab. Sarolangun. Namun, tidak berjalan sesuai harapan karena berbagai kendala diantaranya biaya.</p> <p>Pada tahun 2018 pihak PT Sari Aditya Loka 1 bertemu dengan Pengelola PAUD Nurul Islam untuk membantu mengaktifkan kembali. Sesuai dengan kesepakatan, sekolah ini kembali diaktifkan kembali. Agar sekolah tetap berjalan pihak PT Sari Aditya Loka 1 berkoordinasi dengan pihak Desa, Temenggung Afrizal dan Balai TNBD perihal sekolah PAUD Nurul Islam. Sanggar belajar ini menyediakan kelas awal dan TK.</p> <p>f. Gading Rimba Jaya Pada tahun 2018, PT Sari Aditya Loka 1 membantu memberikan pembelajaran bagi anak-anak di rombongan tersebut. Tempat belajar diselenggarakan di teras rumah Temenggung Ngepas.</p> <p>Sekolah Gading Rimba Jaya didirikan dan dikembangkan di kelompok Suku Anak Dalam Temenggung Ngepas di Desa Gading Jaya, Kec. Tabir Selatan, Kab. Merangin. Program sekolah ini memfasilitasi warga anak usia sekolah agar bisa belajar dan diberikan nama Sekolah Gading Rimba Jaya oleh Temenggung Ngepas yang memiliki arti Sekolah rimba yang berada di kawasan Desa Gading Jaya. Sekolah ini difungsikan untuk memberikan pendidikan Baca, Tulis dan Hitung kepada</p>	
--	--	---	--

		<p>Suku Anak Dalam. Keberadaan sekolah di tengah-tengah komunitas Suku Anak Dalam ini selain untuk pemberantasan buta huruf yang terus didengungkan pemerintah juga bertujuan untuk mendekatkan pentingnya pendidikan kepada keluarga dan anak-anak usia sekolah di komunitas Suku Anak Dalam.</p> <p>Pada awal didirikannya Sekolah Rimba Gading Jaya tercatat 10 anak yang mengikuti kegiatan belajar mengajar yang seluruhnya dari Tumenggung Ngepas. Seiring dengan pola hidup tradisional suku anak dalam dan dinamika kelompok dan keluarga, jumlah anak yang mengikuti pendidikan ini mengalami pasang surut jumlah murid. Faktor penyebabnya adalah terjadinya perpindahan tempat tinggal jauh ke dalam hutan karena aktifitas berkebun dan berburu, ritual Melangun pindah tempat tinggal karena adanya kasus kematian anggota kelompok. Sistem pembelajaran di sekolah ini terbagi menjadi tingkat PAUD/TK, kelas jauh dan sampai dengan tingkat Kesetaraan (Paket A, B dan C). Pada prosesnya peserta didik akan dilatih sesuai dengan tingkatan pendidikannya yang disesuaikan dengan kemampuannya.</p> <p>g. Rimbo Aurduri PT Sari Aditya Loka 1 membantu mendirikan sekolah anak-anak agar lebih terarah dan tertib. Pada akhirnya Tim PT. Sari Aditya Loka memberikan dukungan penuh terhadap keberlangsungan pendidikan di sana. Sekolah Rimbo Aurduri diambil dari nama daerah tempat tinggal kelompok Pakjang yakni Aurduri yang terletak di kecamatan Nalo Tantan. Didirikan pada tanggal 7 Januari 2019 oleh PT. Sari Aditya Loka 1 dan dikembangkan di kelompok Suku Anak Dalam Kelompok Temenggung Pakjang. Sanggar belajar ini menyediakan kelas awal, dasar dan TK</p> <p>h. Rimbo Sako Selensing Pada tahun 2019, PT SAL membantu mengembangkan Sekolah Rimba Sako Selensing yang didirikan dan dikembangkan di kelompok Suku Anak Dalam kelompok Selambai Desa Bukit Suban, Kec. Air Hitam, Kab. Sarolangun.</p> <p>Program sekolah ini untuk memfasilitasi mereka agar bisa belajar. Sanggar belajar ini diberikan nama Rimbo Sako Selensing oleh Sub Rombongan Selambai. Sekolah Rimba Sako Selensing yang berarti Sekolah rimba yang berada dikawasan</p>	
--	--	--	--

		<p>bukit dua belas didekat sungai Sako Selensing. Sekolah ini difungsikan untuk memberikan pendidikan Baca, Tulis dan Hitung kepada Suku Anak Dalam.</p> <p>Keberadaan sekolah di tengah komunitas Suku Anak Dalam ini selain untuk pemberantasan buta huruf yang terus didengungkan pemerintah tetapi juga bertujuan untuk mendekatkan pentingnya pendidikan kepada keluarga dan anak-anak usia sekolah di komunitas Suku Anak Dalam. Pada awal didirikannya Sekolah Rimbo Sako Selensing tercatat 7 anak yang mengikuti kegiatan belajar mengajar yang seluruhnya dari Kelompok Selambai. Seiring dengan kemajuan pola pikir kelompok Selambai, para orang tua sudah mengerti akan pentingnya pendidikan, akhirnya muridpun bertambah menjadi 14 anak. Sistem pembelajaran di sekolah ini terbagi menjadi tingkat PAUD/TK, kelas jauh dan sampai dengan tingkat Kesetaraan (Paket A, B dan C). Pada prosesnya peserta didik akan dilatih sesuai dengan tingkatan pendidikannya yang disesuaikan dengan kemampuannya.</p> <p>i. Pundi Kayu 1</p> <p>Pada bulan September 2018 PT. Sari Aditya Loka 1 mulai membantu pengembangan sekolah ini. Bentuk bantuan berupa biaya operasional sekolah dan makanan tambahan. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di Balai Pertemuan Kartika Desa Bukit Suban. Sekolah Pundi Kayu 1 diperuntukkan bagi Sub Rombongan Nggrip. Sanggar belajar ini menyediakan kelas awal, dasar dan TK. Kelas jauh juga disediakan untuk 2 anak di SDN 191 Pematang Kabau. Guru yang mengajar berjumlah 4 orang dan diberlakukan sistem rolling dengan Pundi Kayu 2</p> <p>j. Rimbo Payung Pagar Alam</p> <p>Sanggar Belajar ini didirikan pada Oktober 2018 di samping rumah Pak Wahab. Sanggar belajar ini awalnya diperuntukkan bagi Sub Rombongan Meriau. Namun setelah berjalan 4 bulan, aktivitas belajar mengajar tidak berjalan lagi. Saat ini kegiatan belajar mengajar dilaksanakan kepada Sub Rombongan Selambai / Sirai. Sanggar belajar ini menyediakan kelas awal dan TK</p> <p>Selain sanggar belajar, PT SAL juga menyediakan 44 paket beasiswa di tingkat SD, SMP hingga SMA/SMK. Beasiswa ini dimulai sejak tahun 2016</p>	
--	--	---	--

		<p>ditandai dengan pemberian beasiswa untuk Abdul Rahman di SMK MM Yogyakarta. Sementara itu sejak tahun 2018, warga OR lain yang telah masuk usia sekolah mendapatkan beasiswa dari PT SAL.</p> <p>PT SAL juga mendirikan program “Madu Rimbo” atau Wisma Terpadu Orang Rimba yang merupakan program lanjutan dari program sekolah non formal. Di dalam program ini, perusahaan memberikan beasiswa penuh dan asrama bagi siswa Orang Rimba sehingga kegiatan sekolah tidak terganggu dengan budaya berpindah “melangun”. Program ini diberikan untuk mempersiapkan Orang Rimba menempuh pendidikan di sekolah formal.</p> <p>Saat ini terdapat lima siswa yang mengikuti program Madu Rimba. Total siswa binaan PT SAL-1 adalah 303 anak.</p> <p>Hambatan umum yang dihadapi dalam program pendidikan yaitu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya pernikahan dini sehingga program tidak berjalan dengan maksimal • Anak usia sekolah OR kesulitan untuk berbaur di sekolah formal dan belum bersedia menempuh pendidikan • Anak usia sekolah sering ikut orang tuanya masuk ke hutan atau berpindah –pindah untuk mencari uang seperti berburu dan mencari jernang serta melangun <p>Pilar Kesehatan</p> <p>Inisiatif program kesehatan untuk Orang Rimbo telah dilakukan sejak tahun 2008. Program yang dilakukan adalah penyuluhan dan pelayanan kesehatan.</p> <p>Selain penyuluhan dan pelayanan kesehatan, kepada Dukun Bersalin juga diberikan pelatihan yang bertujuan untuk menambah wawasan para dukun dalam membantu persalinan di dalam kawasan, menekan tingginya angka kematian pada ibu dan bayi serta mendekatkan para dukun dan ibu hamil pada pusat pelayanan kesegatan atau tenaga medis yang berada di desa.</p> <p>Pelatihan diberikan kepada 11 (sebelas) orang peserta yang berasal dari 4 (empat) rombongan Orang Rimbo, yaitu Temenggung Tarib, Ngasik dan Meletik yang berasal dari Rombongan Temenggung Tarib; Mina, Tawai dan Bejabusuto dari Rombongan Nugraha; Lalan, Sianjar, Besemen, dan Nyabal besar dari Rombongan Nggrip; dan Begumbak dari Rombongan Ninjo.</p>	
--	--	---	--

		<p>Pada tahun 2012, PT SAL melakukan perbaikan pelayanan dengan tajak yang berbeda dari sebelumnya, yaitu pembentukan 2 (dua) unit Posyandu untuk Orang Rimbo. Posyandu yang pertama berlokasi di Rombongan Betaring (Desa Pematang Kabau) yang bernama Posyandu Astera dan posyandu kedua berlokasi di Rombongan Tarib (Desa Bukit Suban) yang bernama Posyandu Raflesia. Kegiatan yang dilaksanakan dalam posyandu tersebut adalah pelatihan kader, pelaksanaan program posyandu 5 (lima) meja dan program tambahan Posyandu. Jumlah peserta pada tahun 2012 pada Posyandu Astera adalah 25 orang dan Posyandu Raflesia adalah 37 orang.</p> <p>Pada tahun 2014, kegiatan pelayanan kesehatan dan penyuluhan dilebarkan ke 2 (dua) rombongan Orang Rimbo dengan jumlah peserta yang berobat adalah sebanyak 81 orang. Kegiatan ini dikemas dalam bentuk kerjasama dengan Puskesmas setempat yang juga memberikan penyuluhan mengenai kesehatan gigi dan mulut.</p> <p>Pada tahun 2015, dengan dokter yang disediakan perusahaan dan kerjasama dengan berbagai pihak, seperti Kodim 0340 Sarko dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun meningkatkan layanan kesehatan yang melibatkan 112 orang dari rombongan Temenggung Grip, Temenggung Bepayung, Temenggung Tarip dan Nugrah. Penyuluhan juga diberikan kepada peserta mengenai kesehatan diri, lingkungan, dan keluarga berencana.</p> <p>Pada tahun 2016 tepatnya bulan September, PT SAL membangun 1 (satu) unit klinik untuk pengobatan Orang Rimbo di rombongan Betaring (bagian dari Temenggung Nangkus). Sejak itu pula, tim medis perusahaan mulai rutin melakukan kunjungan pengobatan di rombongan Temenggung Nangkus, Temenggung Nggrip dan Temenggung Sikar, dengan rata-rata jumlah pasien yang berobat selama bulan Oktober – Desember 2016 adalah sebanyak 81 orang. Selain pengobatan, kegiatan Posyandu juga tetap berjalan, bahkan sudah bertambah 1 (satu) unit Posyandu di rombongan Temenggung Sikar. Kegiatan pelayanan Keluarga Berencana juga dilakukan bagi Orang Rimbo yang bersedia untuk menggunakan alat kontrasepsi. Untuk meningkatkan pengetahuan Orang Rimbo mengenai kesehatan diri dan lingkungan, perusahaan juga memberikan penyuluhan sebanyak 2 kali dalam sebulan di rombongan-rombongan tersebut.</p>	
--	--	--	--

		<p>Mulai tahun 2017, pelaksanaan program kesehatan sudah lebih terstruktur dengan baik dan rutin. Program kesehatan dibagi menjadi 3 sub program, yaitu program preventif yang meliputi Posyandu, pelayanan KB dan pemberian makanan tambahan, program promotif yang meliputi penyuluhan kesehatan diri dan lingkungan dan program kuratif berupa pengobatan. Kegiatan Posyandu dilakukan rutin satu kali dalam sebulan, pelayanan KB dilakukan sesuai dengan permintaan Orang Rimbo, sedangkan pemberian makanan tambahan dilakukan di 2 (dua) kelompok. Penyuluhan rutin dilakukan 2 kali dalam sebulan di masing-masing sub rombongan atau biasa disebut kelompok, yang saat ini telah berkembang menjadi 14 kelompok.</p> <p>Kegiatan pengobatan dilakukan rutin sekali seminggu di setiap kelompok. Peserta yang mengikuti kegiatan tersebut diatas tergolong fluktuatif tergantung keadaan kelompok tersebut. Pada saat musim pancaroba dan penghujan, jumlah yang berobat akan meningkat dengan rata-rata pasien 60-90 orang per bulan. Sedangkan untuk penyuluhan memiliki peminat yang tinggi dengan jumlah kehadiran mencapai 108 orang per bulan. Sejak tahun 2018, perusahaan juga menyediakan 1 (satu) unit ambulance yang dapat digunakan sebagai fasilitas untuk merujuk pasien ke klinik yang lebih lengkap seperti Puskesmas dan Rumah Sakit terdekat.</p> <p>Pelayanan kesehatan ini berupa pemeriksaan dan pengobatan. Pelayanan kesehatan dilakukan melalui kunjungan langsung ke pemukiman Orang Rimba dengan jadwal rutin yang telah disepakati maupun klinik kesehatan yang telah disediakan.</p> <p>Kegiatan layanan kesehatan dilakukan melalui kunjungan rutin ke setiap sub rombongan 2 kali seminggu. Terdapat 2 tim untuk melaksanakan pengobatan. Kunjungan ke Sub Rombongan ini adalah salah satu bentuk aktivitas untuk memberikan pemeriksaan dan pengobatan gratis bagi OR. Pada saat kunjungan bisa jadi ada pasien dan tidak tergantung kondisi warga. Di awal bulan Tim Medis rutin melaksanakan sosialisasi kepada warga terkait jadwal kunjungan.</p> <p>Dua unit Pos Kesehatan di wilayah dua kelompok Orang Rimba Saidun dan Betaring telah didirikan oleh PT SAL-1 yang memberikan layanan kesehatan berupa pemeriksaan dan pengobatan medis, vaksinasi, penyuluhan kesehatan serta pemberian makanan tambahan. Pelayanan kesehatan dilakukan di klinik, jika ada, atau kunjungan ke sudung OR (pelayanan kesehatan jemput bola). Kegiatan yang dilakukan adalah pengobatan bagi yang sakit, pengecekan kesehatan bagi ibu hamil, dan</p>	
--	--	---	--

		<p>pelayanan kesehatan pasca melahirkan terhadap ibu dan bayi serta pemberian vitamin. Jika ada anggota keluarga yang sakit, pada saat mereka sedang berada di luar kawasan, mereka mendatangi fasilitas kesehatan terdekat seperti puskesmas atau langsung membeli obat di apotik. Namun, saat mereka berada di dalam kawasan dan susah menjangkau fasilitas kesehatan, mereka menggunakan obat-obatan tradisional yang tersedia di alam. Jika mereka ingin berobat kepada tim medis PT. SAL, biasanya mereka menghubungi tenaga pendamping di wilayah mereka masing-masing dan kemudian menyampaikan kepada tim medis untuk segera melakukan kunjungan pengobatan. Sebanyak 508 jiwa telah mendapatkan layanan kesehatan tersebut.</p> <p>Selain program kuratif, Perusahaan juga senantiasa menyelenggarakan program promotif dan preventif melalui kegiatan penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), penyuluhan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), penyuluhan Keluarga Sehat dan gotong royong penanaman Tanaman Obat Keluarga (TOGA) di sekitar pemukiman warga.</p> <p>Sementara itu penyelenggaraan 5 Posyandu juga telah dilaksanakan di 7 Sub Rombongan. Sebelum didirikan posyandu dilakukan diskusi awal dengan warga. Jika mereka bersedia, maka dilaksanakan pemilihan kader posyandu dari mereka sendiri. Peserta posyandu adalah bayi, balita, ibu hamil dan ibu menyusui. Pada Posyandu, dilakukan penimbangan dan pengukuran tinggi badan pada anak usia 0-5 tahun, pemeriksaan ibu hamil, pelayanan KB dan penyuluhan. Bantuan kesehatan intensif juga diberikan kepada wanita hamil, bayi dan balita melalui 5 unit posyandu yang didirikan oleh Perusahaan yaitu.</p> <p>Pada Posyandu, dilakukan penimbangan dan pengukuran tinggi badan pada anak usia 0-5 tahun, pemeriksaan ibu hamil, pelayanan KB dan penyuluhan. Di rombongan OR yang tidak memiliki Posyandu, program yang dilakukan adalah pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan antropometri, penyuluhan, vaksinasi, pelayanan KB dan pemeriksaan ibu hamil. Posyandu dilakukan 1 kali dalam 1 bulan. Pemberian Makanan Tambahan juga diberikan kepada para peserta melalui posyandu dan senam kesehatan Orang Rimba.</p> <p>Selain itu perusahaan juga telah memfasilitasi penyediaan 3 unit sumber air bersih bagi Orang Rimba untuk memastikan mereka mendapatkan pasokan air bersih untuk menunjang kegiatan sehari-hari. Permintaan</p>	
--	--	---	--

		<p>fasilitas sanitasi sumber air bersih dan toilet berasal dari OR sendiri karena akses terhadap fasilitas tersebut tidak ada.</p> <p>PT SAL dan warga OR berkolaborasi dalam mendirikan sumber air bersih dan toilet tersebut. Tiga unit toilet didirikan di Sub Rombong Betaring, Sikar dan Saidun. Sementara itu sumber air bersih dan toilet telah tersedia di Rombongan lain seperti Rombongan Nggrip, Nangkus dan Afrizal. Tiga unit toilet juga telah didirikan dengan melibatkan Orang Rimba dalam proses pembangunannya. Secara rutin Perusahaan juga telah memberikan penyuluhan tentang Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).</p> <p>Pilar ekonomi</p> <p>PT SAL juga telah menggulirkan program peningkatan pendapatan berdasarkan aspirasi dari warga Orang Rimba sejak tahun 2008 dimulai dari pelatihan montir, budidaya ikan, beternak ayam, pennggemukan labi-labi, budidaya jahe dan bertanam jernang.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Program Ketrampilan Montir Para pemuda dari warga Orang Rimba berminat mengikuti pelatihan montir yang diselenggarakan oleh PT SAL-1 yang bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK), Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sarolangun. Pelatihan ini diselenggarakan pada tahun 2008 .2. Budidaya hortikultura PT Sari Aditya Loka-1 mendirikan 4 kebun percontohan hortikultura di Rombong Nggrip, Nangkus, Bepayung dan Kelompok Nugrah mulai akhir tahun 2015. Program ini diinisiasi berdasarkan permintaan Orang Rimba yang ingin memanfaatkan lahan yang terbengkalai. Komoditi yang ditanam bervariasi mulai dari kacang panjang, mentimun, kacang kedelai, jagung, kangkung dan cabai. Tujuan pendirian kebun percontohan ini adalah untuk mengenalkan dan menginspirasi Orang Rimba untuk menanam hortikultura di lahan atau pekarangan mereka. Dengan adanya kebun percontohan ini, diharapkan warga rimba akan terinspirasi untuk memanfaatkan lahan atau pekarangan mereka dengan menanam palawija. Dampak yang diharapkan dari program ini adalah peningkatan pendapatan jangka pendek serta adanya perubahan pola meramu menjadi bercocok tanam dan dari kehidupan nomaden menjadi menetap. Keempat kebun	
--	--	---	--

		<p>percontohan ini difasilitasi oleh PT Sari Aditya Loka-1 yang berperan dalam menyediakan bibit, pupuk, pengolahan lahan dan pestisida. Bibit yang disediakan juga bervariasi tergantung dengan minat dari masing-masing rombongan.</p> <p>Partisipasi warga rimba dalam mendirikan kebun percontohan sangat diperlukan untuk membangun rasa memiliki. Tidak hanya memfasilitasi kebun percontohan, perusahaan juga melakukan pembinaan melalui pelatihan kepada warga rimba yang ingin menanam palawija. Semangat pemilik kebun percontohan telah menginspirasi 16 warga rimba untuk menanam palawija. Mereka berasal dari Rombongan Pak Nggrip, Kelompok Pak Nugrah dan Rombongan Pak Tarib.</p> <p>3. Budaya Menabung Kegiatan budaya menabung yang digagas PT Sari Aditya Loka-1 bertujuan untuk merangsang warga rimba agar menjadikan menabung menjadi kebiasaan. Ketika sudah menjadi kebiasaan maka mereka diharapkan akan memprioritaskan menyisihkan sebagian dari pendapatannya terlebih dahulu untuk ditabung daripada dikonsumsi. Peserta program diikuti oleh 65 orang induk dari setiap KK dari 6 rombongan.</p> <p>4. Program Budidaya Jahe Gajah dan Jahe Merah Usulan Program usaha budidaya jahe gajah dan jahe merah dikemukakan oleh Pak Tarib kepada PT SAL-1. Permintaan Pak Tarib direspon dengan pendirian 1 unit kebun percontohan di lahannya yang terletak di Kutai, Desa Pematang Kabau, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun pada bulan Agustus 2016. Selain itu PT SAL-1 juga memberangkatkan 7 orang warga Rimbo ke lokasi pembudidayaan jahe organik di PT Sidomuncul Bergas Kab. Semarang untuk mengikuti kegiatan pelatihan budidaya jahe.</p> <p>5. Budidaya Ikan Lele Program lele berawal dari ide Bapak Tarib yang menyampaikan kepada tim ekonomi mengenai minatnya terhadap budidaya lele. PT SAL memfasilitasi penyediaan kolam lele bioflok yang dilaksanakan di lokasi Pak Tarib dan Pak Nggrip dengan 10 kolam (masing-masing 5 kolam).</p>	
--	--	--	--

		<p>6. Budidaya Ayam Kampung Program ayam terbentuk diawali dengan perundingan antara PT SAL 1 dengan Kelompok Mette pada tanggal 18 November 2018 tentang bantuan program apa yang cocok dan diinginkan kelompoknya. Budidaya ayam ini dikelola oleh 1 Kelompok yang terdiri dari 5 orang.</p> <p>7. Budidaya Jernang Program ini merupakan implemementasi kerja sama antara PT SAL-1 dengan Balai TNBD. Budidaya jernang merupakan salah satu program pengayaan TNBD yaitu Pengayaan Tanaman Jernang. Program ini diharapkan dapat memberikan hasil jangka Panjang bagi Suku Anak Dalam dengan memanfaatkan Kawasan TNBD yang sudah menjadi rumah bagi mereka. Selain itu program ini juga bermanfaat untuk pengayaan taman nasional. Sistem yang diberikan dalam kegiatan ini adalah dengan penanaman bibit dewasa, pemberian insentif bagi SAD yang membibitkan dan menanam dan pembuatan lokasi percontohan.</p> <p>Implementasi program kerja sama ini mulai diwujudkan dalam kegiatan pelatihan budidaya jernang oleh 21 orang peserta pada tahun 2018. Setelah pelatihan dilaksanakan, para peserta mendapatkan bibit jernang masing-masing 20-25 pokok untuk ditanam di kawasan TNBD. Total jernang yang telah ditanam adalah sebanyak 520 batang. Dengan pertimbangan rotan jernang akan berkembang menjadi rumpun dan jarak tanam disediakan untuk penyadapan pohon karet.</p> <p>Kegiatan pelatihan ini diharapkan dapat memotivasi orang Rimbo untuk menjaga rotan yang tersisa dan melakukan pengayaan di dalam kawasan hutan sehingga mampu memberikan peningkatan pendapatan bagi Orang Rimbo.</p> <p>8. Penggemukan labi-labi PT SAL-1 menyediakan 3 unit kolam penampungan labi-labi yang telah dilaksanakan sejak bulan September 2018. Kolam ini berfungsi sebagai tempat pemeliharaan labi-labi yang diburu oleh OR sampai tahap siap dikonsumsi atau dijual kepada sesama OR. Sementara itu mereka mencari labi labi di sungai untuk dibesarkan di kolam tersebut. Program ini berasal dari</p>	
--	--	---	--

		<p>usulan Orang Rimbo Kelompok Ninjo / Meriau . Hal ini dilatarbelakangi oleh kegemaran mereka dalam mengkonsumsi labi –labi yang diikuti oleh Meriau dan Nyerak dari Sub Rombongan Ninjo / Meriau.</p> <p>Hambatan umum yang sering dirasakan dalam program peningkatan pendapatan warga Orang Rimba adalah sulitnya ketika mereka masih sering melangun dan pergi ke dalam hutan sehingga komoditi yang dipelihara tidak diurus. Di awal program, para peserta juga belum terbiasa merawatnya secara rutin sehingga perlu pendampingan yang lebih intensif.</p>	
2. INFORMASI DARI LSM LOKAL			
	<p>LSM lokal mengatakan bahwa hanya segelintir Orang Rimba yang dipekerjakan oleh PT Sari Aditya Loka 1 dan sebagian besar menghadapi diskriminasi dan pengangguran.</p>	<p>Bisakah ditambahkan informasi mengenai LSM Lokal yang memberi keterangan tersebut?</p> <p>PT SAL telah mempekerjakan 8 orang dari Komunitas OR sebagai karyawan tetap. Namun 1 orang telah keluar dan saat ini PT SAL-1 sedang mempekerjakan 7 orang karyawan yang berasal dari Orang Rimba, dengan komposisi 6 orang laki-laki dan 1 orang perempuan.</p> <p>Kami selalu terbuka dengan Orang Rimbo yang ingin bekerja di bekerja di PT SAL dengan mengikuti pelatihan yang Kami sediakan agar mereka siap untuk bekerja sebagai karyawan.</p>	
3. HASIL PENELITIAN HUMAN RIGHT WATCH			
a	<p>Sejumlah Orang Rimba ini mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa PT Sari Aditya Loka 1 berdiri di tanah yang merupakan tanah leluhur mereka</p>	<p>Lahan yang diusahakan oleh PT SAL-1 adalah lahan Negara yang mendapatkan izin berupa Hak Guna Usaha.</p> <p>Kehadiran PT SAL-1 di Sarolangun-Merangin adalah karena diminta oleh Negara/Pemerintah untuk membantu pembangunan perkebunan inti rakyat (PIR)-trans yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 353 / Kpts / KB.510 / 6 / 1987 tentang pengembangan PIR Trans Kelapa Sawit di Daerah Rantau Panjang Tabir, Kabupaten Sarolangun Bangko dan Daerah Muara Bungo, Kabupaten Bungo Tebo Provinsi Daerah Tingkat I Jambi.</p>	<p>- Salinan HGU PT SAL-1 - Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 353 / Kpts / KB.510 / 6 / 1987 tentang proyek pengembangan PIR Trans Kelapa Sawit</p>

b	<p>Orang Rimba yang tinggal di area perkebunan PT Sari Aditya Loka 1 hidup dalam kemiskinan yang parah, semua hidup dalam infrastruktur seadanya dari lembaran plastik yang diikat dengan tongkat.</p>	<p>Bagaimana HRW dapat mengidentifikasi bahwa Orang Rimba yang menjadi korespondensi memang tinggal di areal perkebunan PT SAL? Apakah HRW juga memiliki peta HGU PT SAL?. Perlu diketahui bahwa areal perkebunan sawit PT SAL berdampingan dengan kebun sawit plasma milik masyarakat.</p> <p>Bagaimana kriteria kemiskinan yang dimaksud? Bisakah dijelaskan lebih detail apa saja faktor-faktor yang mengindikasikan bahwa OR yang tinggal di areal perkebunan PT SAL-1 hidup dalam kemiskinan yang parah?. Berapa responden Orang Rimba yang HRW maksud disini?.</p>	
c	<p>Anggota masyarakat Orang Rimba yang diwawancarai berjuang untuk mendapatkan makanan dan mengemis di jalan raya Sarolangun.</p> <p>Mereka semua mengaku sering memulung buah aren yang jatuh agar bisa membeli makanan bagi keluarga mereka, dan harus kelaparan jika itu tidak cukup. Orang Rimba yang tinggal di area perkebunan PT Sari Aditya Loka 1 hidup dalam kemiskinan yang parah dan kelaparan</p>	<p>Bisa ditambahkan informasi mengenai Orang Rimba siapa saja yang dimaksud disini, dan berapa banyak ?</p> <p>Jika mengacu kepada data hasil verifikasi bersama PT SAL-1, Warsi dan Daemeter, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, mata pencaharian Orang Rimba adalah berburu, meramu, berkebun sawit, berkebun karet, mengutip berondolan dan bekerja sebagai karyawan.</p> <p>Jadi kelompok Orang Rimba yang mana yang dalam korespondensi HRW mencari nafkah dengan mengemis?.</p> <p>Dan kelompok mana yang diceritakan disini hidup dalam kelaparan?.</p> <p>PT SAL telah membangun program pengentasan kelaparan untuk orang rimba yang bersinggungan. Hingga hari ini, setidaknya 1082 Orang Rimba telah menerima bahan makanan pokok yang secara rutin diberikan setiap bulan berupa 15-20 Kg beras dan paket bahan makanan lainnya. Dengan berlandaskan prinsip kemandirian dan berkelanjutan, PT SAL turut menyediakan lahan percontohan Suluh Rimba untuk bercocok tanam yang akan dimanfaatkan sebagai sumber ketahanan pangan Orang Rimba dengan komoditas umbi-umbian sebagai sumber karbohidrat. Lahan percontohan tersebut telah disiapkan di dua lokasi yang berdekatan dengan lokasi pemukiman Orang Rimba seluas 2,3 Ha. Proses ini tidak hanya mencakup bagaimana menghasilkan bahan pokok, tetapi merupakan proses pendampingan kepada Orang Rimba tentang kultur teknis agronomi, sehingga mereka dapat belajar tentang cara bercocok tanam yang benar.</p> <p>Sehingga pertanyaan Kami, bisakah diinformasikan kepada Kami dimana HRW menemukan kasus kelaparan tersebut?.</p>	 <p><i>Mobilisasi Orang Rimba tidak dilakukan dengan berjalan kaki, namun telah menggunakan sepeda motor untuk menunjang kegiatan harian</i></p> 

		Program secara detil telah tercantum di dalam Tanggapan terhadap hasil penelitian poin 1C	<i>Malik, anggota Rombongan Afrizal, adalah salah satu warga Orang Rimbo yang telah berinteraksi dengan warga desa dan telah menetap di luar wilayah kawasan TNBD. Kebutuhan Orang Rimbo saat ini tidak hanya berkuat pada kebutuhan primer namun juga kebutuhan sekunder hingga tersier</i>
	OR mengatakan bahwa penjaga keamanan perusahaan sering mengusir mereka, memaksa mereka untuk pindah. Penjaga keamanan perusahaan sering mengusir OR dan memaksa mereka untuk pindah.	Jika ada bukti mengenai hal ini, mohon dikirimkan buktinya agar dapat ditinjaulanjuti kembali. PT SAL sendiri telah memiliki kebijakan khusus dalam rangka mengatur batasan petugas keamanan ketika berinteraksi dengan Orang Rimba, bahwa petugas keamanan perlu memperhatikan beberapa kaidah seperti : <ul style="list-style-type: none"> a. Tidak diperkenankan melakukan intimidasi dalam bentuk apapun terhadap Orang Rimbo b. Tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap Orang Rimbo c. Tidak diperkenankan untuk menghardik, mengeluarkan kata-kata kotor dan merendahkan Orang Rimbo d. Selalu membangun komunikasi yang persuasif dengan tata cara yang baik e. Memperlakukan Orang Rimbo dengan baik berdasarkan azas – azas kemanusiaan 	
	Orang Rimba mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa mereka tidak memiliki informasi tentang pertanian “plasma” yang dikembangkan oleh PT Sari Aditya Loka 1.	Kebun Plasma merupakan program pemerintah yang disediakan untuk skema perkebunan inti rakyat. Program PIR-Trans sendiri adalah murni program yang diinsiasi oleh Pemerintah dan 100% merupakan kewenangan Pemerintah. PT SAL diminta oleh Negara/Pemerintah Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 353 / Kpts / KB.510 / 6 / 1987 hanya untuk membantu membangun Perkebunan Inti Rakyat (PIR-Trans), sedangkan HGU PT SAL sendiri baru diberikan pada tahun 1996. Pada Tahun 2001-2002, Pemerintah telah menyediakan program pembangunan Kebun KKPA (Koperasi Kredit Primer Anggota) seluas 1060 Ha untuk masyarakat lokal (Melayu dan Orang Rimba). Dari 1060 Ha, 100 ha diberikan kepada 50 Kepala Keluarga Orang Rimba. Seluruh proses dan mekanisme serta penentuan masyarakat lokal yang mendapatkan lahan tersebut ditentukan Pemerintah. PT SAL tidak diberikan kewenangan untuk terlibat dalam mekanisme tersebut.	

		Namun seiring berjalannya waktu, kebun KKPA yang diberikan kepada Orang Rimba dijual di bawah tangan sebelum lunas.	
	Sementara operasi PT Sari Aditya Loka 1 pertama kali dimulai pada tahun 1989, reformasi hukum seperti Peraturan tentang mendapatkan Izin Lokasi, undang-undang Perlindungan Lingkungan dan Manajemen 2009, antara lain, setelah itu memperkenalkan banyak tanggung jawab pada perusahaan untuk berkonsultasi dengan masyarakat lokal yang terkena dampak operasi dan mengambil tindakan untuk mengatasi masalah mereka, yang menurut penelitian kami tidak dilakukan.	<p>Legalitas HGU PT SAL-1 pertama kali dikeluarkan pada tahun 1996 sehingga operasi pengelolaan kebun inti dilaksanakan setelah tahun 1996.</p> <p>PT SAL selalu berupaya untuk membantu masyarakat Orang Rimbo yang telah dilakukan lebih dari 10 tahun yang lalu. Dalam proses tersebut, PT SAL senantiasa mempelajari kultur-budaya, kebiasaan, dan kebutuhan orang Rimba, sehingga program-program yang ditumbuh-kembangkan dapat memiliki manfaat yang signifikan untuk Orang Rimba.</p> <p>Program secara detil telah tercantum di dalam Tanggapan terhadap hasil penelitian poin 1C</p>	- Salinan HGU PT SAL-1
	Terlepas dari kapan operasi pertama kali dimulai dan sifat tanggung jawab hukum pada saat itu, perusahaan berkewajiban untuk melakukan uji tuntas hak asasi manusia yang berkelanjutan sesuai dengan Prinsip-Prinsip Panduan PBB 2011 tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Penting untuk dicatat bahwa kebijakan keberlanjutan PT Astra Agro Lestari (perusahaan induk) merujuk Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia dan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat.	PT Astra Agro Lestari telah memiliki kebijakan sustainability (diterbitkan September 2015) yang telah dipublikasikan baik melalui website maupun laporan keberlanjutan. Di dalam kebijakan tersebut telah tercantum komitmen perusahaan salah satunya adalah Menghormati hak-hak manusia termasuk di dalamnya adalah hak-hak masyarakat adat. Hal ini juga berlaku bagi PT Sari Aditya Loka selaku anak perusahaan. Secara detil telah diuraikan dalam point 1c . Program-program Kami terkait dengan Orang Rimba dapat dilihat dalam laporan tahunan (sejak tahun 2007) dan laporan kuartal yang dapat diakses melalui situs: http://www.astra-agro.co.id/en/sustainability-policy/	- Salinan Sustainability Policy PT Astra Agro Lestari

TANGGAPAN ATAS DAFTAR PERTANYAAN

NO	DAFTAR PERTANYAAN	TANGGAPAN	DATA PENDUKUNG / DOKUMENTASI
1	<p>Mohon sertakan seluruh daftar pengesahan dari pemerintah hingga saat ini, termasuk salinan dari Hak Guna Usaha (HGU).</p>	<p>Luas HGU PT SAL-1 yang diterbitkan pada tahun 1996 seluas 5,171 ha dan diberikan tanggung jawab pengelolaan lahan tambahan 308 ha pada tahun 2005.</p> <p>Perintah membantu pengembangan plasma rakyat tertuang di dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 353 / Kpts / KB.510 / 6 / 1987 tentang proyek pengembangan PIR Trans Kelapa Sawit di Daerah Rantau Panjang Tabir, Kabupaten Sarolangun Bangko dan Daerah Muara Bungo, Kabupaten Bungo Tebo Provinsi Daerah Tingkat I Jambi.</p>	<p>- Salinan HGU PT SAL-1 - Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 353 / Kpts / KB.510 / 6 / 1987 tentang proyek pengembangan PIR Trans Kelapa Sawit di Daerah Rantau Panjang Tabir, Kabupaten Sarolangun Bangko dan Daerah Muara Bungo, Kabupaten Bungo Tebo Provinsi Daerah Tingkat I Jambi</p>
2	<p>Apakah PT Sari Aditya Loka 1 atau induk perusahaannya PT Astra Agro Lestari Tbk terlibat dalam konsultasi dengan masyarakat adat yang terkena dampak dari perkebunan perusahaan di provinsi Jambi? Jika ya, mohon sertakan dokumen terkait.</p>	<p>PT Sari Aditya Loka memiliki dokumen AMDAL yang didalamnya telah termasuk analisis social-ekonomi masyarakat sekitar. Kegiatan penyusunan AMDAL ini diawasi oleh SKPD terkait</p>	
3	<p>Apakah PT Sari Aditya Loka 1 mengumpulkan data mengenai risiko atau dampak dari perkebunan perusahaan terhadap hak asasi manusia? Mohon sertakan salinan dari seluruh penilaian uji kelayakan lingkungan dan dampak sosial yang dilakukan untuk perkebunan kelapa sawit di kabupaten Sarolangun, provinsi Jambi.</p>	<p>Dokumen yang dimaksud telah tertuang dalam Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) PT Sari Aditya Loka-1 yang telah disusun pertama kali pada tahun 1994 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Pertanian c.q. Kepala Badan Agribisnis berdasarkan Surat Menteri Pertanian nomor 071/RKL-RPL/BA/ VI/ 95 .</p> <p>Revisi AMDAL dilakukan pada tahun 2006 yang telah mendapat persetujuan dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) berdasarkan Keputusan Kepala BAPEPALDA Provinsi Jambi nomor 36 tahun 2006 pada tanggal 7 September 2006. Dokumen AMDAL yang telah disusun melakukan analisa dampak penting yang diperkirakan akan muncul sebagai akibat adanya aktifitas perkebunan kelapa sawit dan PKS oleh PT. SAL terhadap lingkungan geofisika – kimia, biologi, sosial dan ekonomi terhadap masyarakat sekitar.</p> <p>Sementara itu dokumen Pemetaan Sosial juga telah disusun oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat Universitas Jambi pada bulan Juni 2013 terhadap 16 desa di sekitar perkebunan sawit PT SAL 1 yang terletak di tiga Kabupaten Merangin, Sarolangun dan Tebo. Dokumen pemetaan sosial yang disusun mampu menyediakan</p>	<p>- Salinan dokumen AMDAL tahun 2006 - Salinan dokumen Pemetaan Sosial PT SAL-1 -Surat Menteri Pertanian nomor 071/RKL-RPL/BA/ VI/ 95 tentang persetujuan AMDAL - Surat Keputusan Kepala BAPEPALDA Provinsi Jambi nomor 36 tahun 2006 pada tanggal 7 September 2006 tentang persetujuan revisi dokumen AMDAL</p>

		informasi tentang kondisi sosial ekonomi dan lingkungan di 16 desa di sekitar perkebunan sawit PT SAL 1 di tiga kabupaten Merangin, Sarolangun dan Tebo terkini yang dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi pihak-pihak terkait dalam melaksanakan kegiatan terutama yang berkaitan dengan pelibatan serta pemberdayaan masyarakat sekitar.	
4	Apakah PT Sari Aditya Loka memiliki kebijakan mengenai pemindahan tempat tinggal dan kompensasi terkait dengan usaha perbaikan bagi kerugian yang terjadi karena akuisisi lahan sebelumnya?	<p>Kebijakan pemindahan tempat tinggal bukan kewenangan dari PT Sari Aditya Loka-1 dan murni kewenangan Pemerintah karena pembangunan kebun di lokasi tersebut mengacu kepada permintaan Pemerintah saat itu untuk membangun kebun plasma sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 353 / Kpts / KB.510 / 6 / 1987 tentang proyek pengembangan PIR Trans Kelapa Sawit di Daerah Rantau Panjang Tabir, Kabupaten Sarolangun Bangko dan Daerah Muara Bungo, Kabupaten Bungo Tebo Provinsi Daerah Tingkat I Provinsi Jambi.</p> <p>Upaya PT SAL untuk terus membantu Komunitas Orang Rimba telah dijelaskan pada point 1c dan reportnya dapat dilihat di website Kami.</p>	- Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 353 / Kpts / KB.510 / 6 / 1987
5	<p>Apakah PT Sari Aditya Loka telah berkonsultasi dengan Orang Rimba mengenai kompensasi atau rencana pemindahan tempat tinggal? Mohon sertakan rincian dari konsultasi yang pernah dilakukan dengan masyarakat adat di provinsi Jambi mengenai kompensasi dan pemindahan tempat tinggal termasuk:</p> <p>a. Tanggal konsultasi;</p> <p>b. Jumlah orang yang ikut dalam konsultasi;</p> <p>c. Jumlah perempuan yang hadir dalam konsultasi;</p> <p>d. Setiap perjanjian mengenai kompensasi dan pemindahan tempat tinggal dengan berbagai kelompok Orang Rimba yang disebabkan oleh kegiatan operasional perkebunan kelapa sawit;</p> <p>e. Setiap perjanjian mengenai pertanian plasma dengan anggota dari masyarakat Orang Rimba.</p>	<p>Seperti telah dijelaskan sebelumnya, keberadaan PT SAL adalah karena permintaan Pemerintah untuk membangun PIR-TRANS. HGU diberikan oleh negara kepada PT SAL agar PT SAL dapat mengemban tanggung jawab yang diberikan oleh Negara. Dalam konteks dengan Orang Rimba, PT SAL selalu berupaya hidup berdampingan, menghargai budaya, serta selalu berupaya membantu Orang Rimba untuk mendapatkan akses-akses yang diperlukan terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan hak sebagai warga negara dengan mengupayakan untuk memfasilitasi 251 kartu tanda penduduk, sehingga orang Rimba dapat mengakses fasilitas dan layanan yang disediakan Pemerintah. Secara detail program tersebut telah dijelaskan di atas. (Point 1c)</p> <p>Ke depan, persoalan orang rimbo bukan hanya menjadi tanggungjawab PT SAL, namun seharusnya instansi Pemerintah juga terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, PT SAL berupaya keras agar kemitraan dengan pihak-pihak yang berkepentingan termasuk diantaranya dari Pemerintah Pusat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Sosial), Balai Taman Nasional Bukit Dua Belas (Balai TNBD), Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Daerah dan SKPD terkait, akademisi dari Universitas Jambi, LSM, Perusahaan serta Orang Rimba sendiri agar dapat berkolaborasi membantu kehidupan orang Rimba.</p> <p>Pemerintah saat ini telah memfasilitasi terbentuknya kemitraan antara para pemangku kepentingan untuk sepakat bekerja sama bahu-membahu membantu kehidupan orang rimba.</p> <p>Secara terpisah, PT SAL telah berkolaborasi dengan Balai TNBD, untuk membantu kehidupan orang rimba melalui skema tiga pilar ekonomi, pendidikan dan kesehatan.</p>	

		Program kerja sama di bidang ekonomi diwujudkan dalam bentuk pengayaan TNBD dalam bentuk penanaman jernang sebagai sumber pendapatan jangka Panjang. Program Pendidikan diwujudkan dalam pengelolaan 2 unit sanggar belajar di wilayah TNBD dan beasiswa di SMK Kehutanan Pekanbaru.	
6	Mohon sertakan informasi mengenai perjanjian antara PT Sari Aditya Loka dengan pemerintah setempat mengenai pemindahan tempat tinggal, kompensasi, dan pendampingan sosial kepada masyarakat Orang Rimba di provinsi Jambi?	<p>Pencadangan Gubernur KDH TK I Jambi No. 03 / BKPMD/ 1992 dan surat persetujuan MENHUT NO.511/ Menhut-II/93 menyatakan luas lahan inti adalah 6.250 Ha dimana sebagian lahan yang tadinya terletak di Kab. Bungo Tebo dipindahkan ke Kabupaten Sarolangun Bangko sesuai Surat Dirjen Perkebunan No KB 510 / E2.848/ 1091 dan selaras dengan surat Gubernur No. 525 / 6546/ BAPEDA. Pencadangan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jambi No 03/BKMD/1992 untuk lahan inti adalah seluas 6250 Ha.</p> <p>Namun demikian, PT SAL hanya menggunakan cadangan lahan untuk menjadi HGU seluas 5.171. Sedangkan seluas 1060 ha dikembalikan kepada Pemerintah untuk diberikan kepada masyarakat (Melayu dan Orang Rimba) atas wewenang Pemerintah dalam bentuk Kebun KKPA.</p> <p>Lahan kelapa sawit seluas 1060 Ha dalam bentuk Koperasi Kredit Primer Aktif (KKPA) telah diberikan kepada masyarakat lokal (Melayu dan Orang Rimba) melalui mekanisme seperti diatas. Kompensasi ini diberikan berdasarkan hasil kesepakatan Pemerintah dengan Masyarakat.</p> <p>Kesepakatan di Kantor Gubernur Jambi pada tahun 2000 telah memutuskan bahwa PT SAL mengembalikan lahan seluas 1062 ha kepada Pemerintah Daerah agar dapat dimanfaatkan untuk masyarakat dengan pola KKPA. Adapun lahan tersebut diberikan kepada 510 Kepala Keluarga yang berasal dari Desa Rantau Panjang, Lubuk Bumbung, Limbur Merangin, Komunitas Suku Anak Dalam dan Rantau Limau Manis.</p> <p>Penunjukkan peserta program KKPA dari Suku Anak Dalam diperkuat dengan penerbitan SK Bupati Sarolangun Nomor 2999 Tahun 2002. Sementara itu untuk peserta yang lain diperkuat dengan SK Bupati Merangin Nomor 543 Tahun 2003 tentang Penunjukan Petani Peserta Plasma Pola KKPA. Program ini diperuntukkan untuk masyarakat asli yang terdiri dari orang dusun (Melayu-Jambi) dan orang rimba.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - SK Bupati Sarolangun Nomor 2999 Tahun 2002 tentang penunjukkan peserta KKPA yang berasal dari Komunitas Suku Anak Dalam - SK Bupati Merangin Nomor 543 Tahun 2003 tentang Penunjukan Petani Peserta Plasma Pola KKPA - Surat Pernyataan dari salah satu peserta KKPA yang menyatakan bahwa kebun KKPA tersebut telah dijual

7	<p>Bagaimanakah pendekatan PT Sari Aditya Loka mengenai pertumbuhan ekonomi dan perkembangan bagi komunitas yang terdampak oleh perkebunan kelapa sawit Anda? Apakah perusahaan telah mengadakan kegiatan inisiatif yang berkaitan dengan pengembangan tingkat ekonomi untuk mendukung masyarakat Orang Rimba yang terkena dampak dari perkebunan Anda di provinsi Jambi?</p> <p>a. Berapa orang yang dipekerjakan secara langsung oleh PT Sari Aditya Loka di provinsi Jambi?</p> <p>b. Berapa orang dari para pekerja tersebut yang berasal dari komunitas Orang Rimba?</p> <p>c. Berapa orang dari pekerja tersebut adalah perempuan Orang Rimba?</p>	<p>PT SAL-1 telah mempekerjakan 1035 karyawan yang berasal dari berbagai suku. Sebanyak 7 orang diantaranya berasal dari Orang Rimba, dengan komposisi 6 orang laki-laki dengan jabatan Security dan 1 orang perempuan dengan jabatan Guru Pratama.</p> <p>Seperti dikemukakan diatas, PT SAL terbuka untuk menerima karyawan dari suku manapun termasuk Orang Rimba. Program pelatihan diberlakukan untuk meningkatkan kecakapan agar siap menjadi karyawan.</p> <p>Program peningkatan pendapatan yang telah dimulai sejak tahun 2008 dan telah tercantum di dalam Tanggapan terhadap hasil penelitian poin 1C</p>	
8	<p>Mohon sertakan salinan dari kebijakan mengenai keberatan dan permintaan ganti rugi dan tanggal dari prosedur tersebut dibuat. Mohon juga sertakan nama dan informasi kontak (email ID dan nomor telepon) dari petugas bagian keberatan dan permintaan ganti rugi di PT Sari Aditya Loka 1.</p>	<p>Kami telah memiliki system untuk menerima keluhan. Secara formal semua keluhan silakan dibuka di http://www.astra-agro.co.id/en/grivance-mechanism/</p> <p>Terkait dengan Orang Rimba, Kami juga telah memiliki team di lapangan yang secara regular melakukan pertemuan dengan setiap rombongan Orang Rimba untuk berdiskusi, menerima keluhan, dan sekaligus merespon keluhan dan kebutuhan Orang Rimba secara cepat.</p>	
9	<p>Apakah PT Sari Aditya Loka 1 memiliki kebijakan mengenai perilaku dari petugas keamanan perusahaan? Apakah perusahaan memberikan pelatihan khusus mengenai bagaimana cara mereka menghadapi Orang Rimba yang tinggal di area perkebunan? Jika ya, mohon sertakan dokumentasi terkait.</p>	<p>Petugas Keamanan PT SAL diwajibkan mengikuti beberapa kaidah berikut terkait penanganan dengan Orang Rimba</p> <ol style="list-style-type: none"> Tidak diperkenankan melakukan intimidasi dalam bentuk apapun terhadap Orang Rimbo Tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap Orang Rimbo Tidak diperkenankan untuk menghardik, mengeluarkan kata-kata kotor dan merendahkan Orang Rimbo Selalu membangun komunikasi yang persuasif dengan tata cara yang baik Memperlakukan Orang Rimbo dengan baik berdasarkan azas – azas kemanusiaan 	

		Kebijakan ini disampaikan kepada seluruh petugas keamanan yang berada di lingkungan PT Sari Aditya Loka-1, tidak hanya sekali, namun berulang kali selalu disampaikan dalam setiap apel petugas keamanan.	
10	Apakah langkah-langkah, jika ada, yang telah diambil oleh perusahaan untuk menyampaikan dan menyebarluaskan kepada komunitas, termasuk masyarakat Orang Rimba, bahwa sistem keberatan dan permintaan ganti rugi tersedia dan bagaimana cara mengakses sistem tersebut?	Kami terus melakukan pendampingan dengan orang rimba melalui kegiatan visitasi yang rutin terhadap Orang Rimba. PT SAL secara rutin melakukan kunjungan <i>door to door</i> melalui tenaga pendamping yang disediakan oleh perusahaan untuk menyerap segala aspirasi dan keluhan Orang Rimba. Metode ini diimplementasikan untuk merespon langsung segala keluhan yang diterima seperti keluhan kesehatan, pendidikan, air bersih, dll. Keluhan disampaikan langsung secara lisan oleh Orang Rimba kepada para tenaga pendamping. Selain menyediakan tenaga pendamping, keluhan juga dapat disampaikan melalui tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang hampir setiap hari berinteraksi kepada Orang Rimba untuk memberikan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Kami melihat, metode ini dirasa paling cocok diterapkan kepada komunitas Orang Rimba yang masih berada dalam keterbatasan.	
11	Apakah langkah-langkah, jika ada, yang telah diambil oleh perusahaan untuk memberikan perlindungan guna memastikan bahwa orang-orang yang mengajukan keberatan dapat mengakses mekanisme yang tersedia tanpa ada rasa takut akan adanya perlawanan balik?	Kami percaya bahwa metode yang telah dijelaskan di atas dapat menjamin Orang Rimba tidak mendapatkan rasa takut akan adanya perlawanan balik. Para tenaga pendamping adalah personil perusahaan yang sangat mengenal dan memahami karakter akan tiap kelompok-kelompok yang didampinginya. Para tenaga pendamping bergaul dan belajar tentang cara hidup mereka sehari-hari sehingga aspirasi dan keluhan seharusnya dapat disampaikan kepada tenaga pendamping. Selama ini keluhan disampaikan secara langsung melalui tenaga pendamping tanpa ada pembatas. Dalam hal ini warga Orang Rimba memiliki akses langsung terhadap perusahaan.	
12	Apakah PT Sari Aditya Loka 1 menerbitkan laporan mengenai keberatan yang diterima sesuai dengan komitmen perusahaan untuk transparan dalam hal pelaporan mengenai keberatan dan solusi (diedit secara benar)? Bagaimana hal ini dilaksanakan? Mohon sertakan informasi mengenai komplain yang diberikan oleh Orang Rimba atau WARSI terkait dengan kerugian terhadap kehidupan hayati di hutan akibat dari operasi PT Sari Aditya Loka 1 di Sarolangun?	PT SAL juga telah menyediakan akses terhadap komplain dan masukan dari pihak manapun. Keluhan dapat diakses di website www.astra-agro.co.id/sustainability/complaint oleh siapapun termasuk Orang Rimba. Namun demikian metode ini tidak tepat untuk Orang Rimba yang memiliki beberapa keterbatasan. Oleh karena itu PT SAL memberlakukan metode seperti yang telah disebutkan di atas untuk menyerap semua keluhan dan aspirasi masyarakat Orang Rimba sehingga dapat direspon secara langsung. Kami telah beberapa kali bertemu dengan Warsi, bahkan melakukan survey bersama di tahun 2017. Komunikasi via email juga beberapa kali telah dilakukan. Seharusnya Warsi tidak memiliki kendala apapun untuk menyampaikannya kepada Kami.	
13	Kami sedang meneliti dampak operasional perusahaan terhadap	Hutan sebagai ruang hidup Orang Rimba masih tersedia di dalam Kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas (TNBD) seluas 54.000 Ha. Saat ini Orang Rimba masih	- Perjanjian Kerja Sama Nomor: Leco/013/SPK-SAL/Ext/IV/2018

	<p>kehidupan Orang Rimba. Apa ukuran yang dipakai PT Sari Aditya Loka guna memastikan akses Orang Rimba pada bahan nyaman, seperti rotan, yang penting untuk penghidupan mereka, tidak berkurang.</p>	<p>melakukan aktivitas bahkan masih bermukim dalam Kawasan TNBD. Jika Kawasan TNBD tidak mampu menyediakan komoditas yang diperlukan oleh Orang Rimba, maka tentunya sudah tidak ada lagi yang bermukim di wilayah tersebut.</p> <p>Oleh karena itu PT SAL-1 juga telah menjalin kerja sama dengan Balai Taman Nasional Bukit Dua Belas sejak bulan April 2018 dalam rangka pemberdayaan Orang Rimba di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Program peningkatan pendapatan difokuskan kepada pengayaan TNBD dengan tanaman rotan jernang sebagai sumber pendapatan jangka panjang. Sementara itu untuk program ketahanan pangan akan didirikan 4 unit kebun percontohan umbi-umbian.</p> <p>Perlu diketahui bahwa Balai TNBD telah memberikan akses kepada OR untuk memanfaatkan areal TNBD sebagai ruang hidup mereka seperti lahan pemukiman dan sumber pendapatan. Hal ini juga telah diperkuat dengan terbitnya Surat Keputusan Dirjen KSDAE Nomor 191/KSDAE/ PIKA/ KSA.0/5/2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang zonasi / tata ruang pengelolaan TNBD</p>	<p>- Surat Keputusan Dirjen KSDAE Nomor 191/KSDAE/ PIKA/ KSA.0/5/2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang zonasi / tata ruang pengelolaan TNBD</p>
--	---	---	--